

PENOLAKAN PERMOHONAN DPC PWRI OLEH KOMISI INFORMASI TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN DI PROVINSI LAMPUNG

Auryn Riznina Indrawikana

Ilmu Hukum

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

Suhariwanto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemerintah dengan ini merupakan satu-satunya pihak yang melekat tugas dan kewenangan instansi pemerintahan, perusahaan, dan badan independen untuk memberikan pelayanan publik yang merupakan pemenuhan layanan terhadap masyarakat terkait barang, jasa, maupun hal administratif sebagaimana pengaturan hukum. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai kepastian hukum terkait keberadaan pelayanan publik yang didalamnya menyangkut hubungan masyarakat bersama penyelenggara. Informasi publik secara terbuka adalah hal penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang merupakan hak masyarakat sebagai pintu pemenuhan segala hak lain. Sebagai perwujudan sistem yang layak sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disisi lain juga sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat pada pelayanan publik dalam pelaksanaannya. Meski, pelayanan publik dalam pelaksanaannya dijumpai adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dengan tak sesuai Undang-Undang berujung melanggar Hak Asasi Manusia, pelaksanaannya tidak memenuhi tujuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga melahirkan masalah informasi di Komisi Informasi.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik, Komisi Informasi Provinsi Lampung.

*REFUSAL OF “DPC PWRI” APPLICATION BY THE INFORMATION
COMMISSION RELATED TO ROAD CONSTRUCTION IN LAMPUNG
PROVINCE*

Auryn Riznina Indrawikana

Law/Legal Studies

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

Suhariwanto, S.H., M.H.

ABSTRACT

The government hereby is the only party that is attached to the duties and authorities of government agencies, companies and independent bodies to provide public services which are the fulfillment of services to the community related to goods, services, as well as administrative matters as regulated by law. Law Number 25 of 2009 concerning Public Services is a legal certainty related to the existence of public services which includes the relationship between the community and the organizers. Open public information is important in the implementation of public services, which is the right of the community as a way to fulfill all other rights. As an embodiment of a proper system as the General Principles of Good Governance (AUPB) have been set forth in Article 10 of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, on the other hand it is also an embodiment of protection for the public in public services in its implementation. Although, in the implementation of public services, it was found that there was abuse of authority by the government which was not in accordance with the law which resulted in violating human rights, its implementation did not fulfill the objectives of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure which gave rise to information problems in the Information Commission.

Keywords: *Public Information Disclosure, Public Service, Information Commission of Lampung Province*